

***FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF THE JAMBI CITY
GOVERNMENT FOR THE 2020-2023 PERIOD***

***ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA
JAMBI PERIODE TAHUN 2020-2023***

Windi Anggriani¹⁾*

Rita Friyani²⁾

Nela Safelia³⁾

1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia

2) & 3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia

**) Korespondensi*

E-mail: wwanggriani@gmail.com¹⁾, ritafriyani6@gmail.com²⁾, nelasafelia@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study analyzes the financial performance of the Jambi City Government for the period 2020–2023 using several key financial ratios: the Degree of Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence, Financial Dependency, PAD Effectiveness, and Expenditure Efficiency. It also formulates strategies to improve regional financial performance through a SWOT analysis. The study employs a quantitative descriptive method based on APBD data, supported by qualitative analysis for strategy formulation. The findings show that the degree of decentralization and fiscal independence remain low, while financial dependency is consistently categorized as very high. PAD effectiveness is relatively good but fluctuates, and expenditure efficiency varies across the period. These results highlight the need to optimize PAD sources and strengthen expenditure management. The SWOT analysis produces strategies such as digitalizing PAD services, enhancing spending efficiency, strengthening collaboration with regional enterprises and the private sector, and improving fiscal accountability. Implementing these strategies is expected to enhance fiscal capacity and strengthen long-term financial independence for the Jambi City Government.

Keywords: *SWOT Analysis, Efficiency, Financial Performance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi periode 2020–2023 melalui rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, efektivitas PAD, dan efisiensi belanja, serta merumuskan strategi peningkatan kinerja menggunakan analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan data APBD dan didukung analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal masih rendah, sementara ketergantungan keuangan berada pada kategori sangat tinggi. Efektivitas PAD relatif baik tetapi berfluktuasi, sedangkan efisiensi belanja bervariasi. Temuan ini menegaskan perlunya optimalisasi PAD dan perbaikan pengelolaan belanja. Melalui analisis SWOT, strategi yang dihasilkan mencakup digitalisasi layanan PAD, peningkatan efisiensi belanja, penguatan kerja sama dengan BUMD dan sektor swasta, serta penguatan akuntabilitas fiskal. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal Pemerintah Kota Jambi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Analisis SWOT, Efisiensi, Kinerja Keuangan*

Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Jambi Periode Tahun 2020-2023 (Windi Anggriani, Rita Friyani, Nela Safela)

1. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan sistem pencatatan dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat yang digunakan oleh berbagai institusi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel (Rahmanda et al., 2025). Di Indonesia, praktik ini diterapkan pada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara sistematis dan memenuhi prinsip akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan daerah, otonomi daerah memberikan hak sekaligus kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam mengelola sumber-sumber pendapatan serta melaksanakan program pembangunan (Kartika, 2023).

Kinerja keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan. Data APBD Pemerintah Kota Jambi menunjukkan bahwa selama periode 2020–2023 terjadi dinamika pada komponen pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan cenderung meningkat, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan persentase, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Realisasi PAD tahun 2022 hanya mencapai 91,20% dari target, dan turun kembali menjadi 82,88% pada tahun 2023. Tren ini mencerminkan lemahnya optimalisasi sumber pendapatan daerah yang berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah.

Di sisi lain, belanja daerah menunjukkan pola fluktuatif, dengan beberapa tahun mencatatkan realisasi di bawah target. Kondisi ini menandakan bahwa efektivitas penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal. Selain itu, APBD Kota Jambi pada seluruh periode penelitian mengalami defisit, dengan nilai defisit terbesar terjadi pada tahun 2021. Defisit ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima sehingga memerlukan strategi pembiayaan yang tepat agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga (Fitri & Kamela, 2025)

Secara umum, pemerintah Kota Jambi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama periode penelitian, menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai standar (Yuvanda et al., 2025). Namun demikian, pencapaian opini tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya kinerja keuangan, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Siswanto & Maylani, 2022). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam untuk melihat sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan daerah benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta meningkatkan kemandirian fiskal Pemerintah Kota Jambi.

Pengukuran kinerja keuangan menjadi penting untuk mendukung pengambilan keputusan, peningkatan kualitas layanan publik, transparansi, serta akuntabilitas pemerintah daerah. Evaluasi kinerja juga diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi

dalam strategi fiskal. Dalam konteks ini, analisis rasio keuangan, seperti Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Derajat Desentralisasi (Mahmudi, 2019), menjadi alat yang relevan untuk menilai sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah mencapai standar yang diharapkan (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022).

Penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan pada berbagai wilayah di Indonesia, namun terdapat perbedaan hasil antar daerah akibat variasi kondisi fiskal, struktur pendapatan, dan karakteristik pembangunan. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan pada tingkat daerah tetap menjadi topik penting untuk diteliti. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode 2020–2023 dengan menggunakan indikator rasio keuangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi fiskal daerah serta menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2020) pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses penilaian efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya publik secara optimal dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai prinsip akuntabilitas.

2.2 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada entitas pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk mengelola dan melaporkan aktivitas keuangan sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan tidak berorientasi pada profit, melainkan pada pencapaian tujuan layanan publik (Sedarmayanti, 2020).

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim (2021) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun secara sistematis dan ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD menggambarkan estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk satu tahun anggaran, sehingga menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal daerah.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi pada periode 2020–2023. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan pengukuran variabel secara objektif melalui perhitungan angka dan teknik statistik, sedangkan sifat deskriptif digunakan untuk menyajikan uraian sistematis mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2020)

Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Jambi Periode Tahun 2020-2023 (Windi Anggriani, Rita Friyani, Nela Safela)

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari keterangan langsung instansi terkait setelah peneliti mengajukan permohonan resmi kepada Pemerintah Kota Jambi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi tahun 2020–2023. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di BPKAD serta penelaahan dokumen-dokumen fiskal yang relevan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat faktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Analisis data dilakukan menggunakan rasio keuangan daerah sebagaimana dirumuskan oleh Mahmudi (2020) meliputi rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, ketergantungan fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, serta efisiensi belanja. Hasil perhitungan rasio tersebut digunakan untuk mengevaluasi tingkat optimalisasi pengelolaan keuangan daerah selama periode penelitian. Selanjutnya, penelitian ini dilengkapi dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja keuangan (Sianturi, 2020).

4. HASIL

4.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 1. Rasio Derajat Desentralisasi

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Hasil	Keterangan
1	2020	369,594,193,000	1,617,658,414,714	22.85	Cukup
2	2021	454,001,834,233	1,658,405,928,034	27.38	Cukup
3	2022	479,170,812,838	1,670,844,905,471	28.68	Cukup
4	2023	541,087,970,969	1,755,751,906,289	30.82	Sedang

Sumber: Hasil Diolah Peneliti (2025)

Rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kota Jambi pada periode 2020–2023 menunjukkan tren peningkatan. Pada 2020, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 22,85% dan berada pada kategori “cukup”. Rasio ini meningkat menjadi 27,38% pada 2021 dan 28,68% pada 2022, yang keduanya masih termasuk kategori “cukup”. Pada 2023, kontribusi PAD mencapai 30,82% sehingga naik ke kategori “sedang”.

4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi	Hasil	Keterangan
1	2020	369,594,193,000	1,402,815,952,182	26.35	Konsultatif
2	2021	454,001,834,233	1,441,725,270,338	31.49	Konsultatif
3	2022	479,170,812,838	1,512,487,472,569	31.68	Konsultatif
4	2023	541,087,970,969	1,585,917,549,839	34.12	Konsultatif

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Jambi pada periode 2020–2023 menunjukkan tren peningkatan. Pada 2020, rasio ini sebesar 26,35% dan berada pada kategori konsultatif. Nilai tersebut meningkat menjadi 31,49% pada 2021 dan naik kembali menjadi 31,68% pada 2022. Peningkatan yang lebih jelas terjadi pada 2023 dengan capaian 34,12%, meskipun seluruh periode masih berada dalam kategori konsultatif.

4.3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

No	Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Hasil	Keterangan
1	2020	1,172,302,417,214	1,617,658,414,714	72.47	Sangat tinggi
2	2021	1,143,179,543,801	1,658,405,928,034	68.93	Sangat tinggi
3	2022	1,191,674,092,633	1,670,844,905,471	71.32	Sangat tinggi
4	2023	1,214,663,935,320	1,755,751,906,289	69.18	Sangat tinggi

Sumber: Hasil Diolah Peneliti (2025)

Tingkat ketergantungan keuangan daerah masih berada pada level tinggi sepanjang 2020–2023. Pada 2020 tercatat sebesar 72,47%, kemudian menurun menjadi 68,93% pada 2021, namun kembali meningkat menjadi 71,32% pada 2022, sebelum turun tipis ke 69,18% pada 2023. Pola fluktuatif ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan PAD, kontribusinya belum mampu menurunkan dominasi pendapatan transfer secara signifikan dalam struktur pendapatan daerah.

4.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Hasil	Keterangan
1	2020	355,674,818,634	369,594,193,000	96.23	Cukup Efektif
2	2021	384,730,643,791	454,001,834,233	84.74	Kurang Efektif
3	2022	437,025,956,358	479,170,812,838	91.20	Cukup Efektif
4	2023	448,460,640,789	541,087,970,969	82.88	Kurang Efektif

Sumber: Hasil Diolah Peneliti (2025)

Efektivitas PAD Pemerintah Kota Jambi menunjukkan fluktuasi sepanjang periode penelitian. Pada 2020, tingkat efektivitas mencapai 96,23% dan berada pada kategori cukup efektif. Pada 2021, efektivitas menurun menjadi 84,74% sehingga masuk kategori kurang efektif, yang kemungkinan terkait tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi membaik pada 2022 dengan meningkatnya rasio efektivitas menjadi 91,20%, meskipun belum optimal. Namun pada 2023 kembali turun menjadi 82,88%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam mempertahankan stabilitas dan optimalisasi pencapaian target PAD.

4.5 Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 5. Rasio Efisiensi Belanja

No	Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Hasil	Keterangan
1	2020	1,665,932,584,837	1,826,936,849,781	91.19	Cukup Efisien
2	2021	1,740,357,878,019	1,961,694,919,058	88.72	Kurang Efisien
3	2022	1,250,909,815,843	1,406,586,331,342	88.93	Kurang Efisien
4	2023	1,720,255,456,671	1,863,794,645,856	92.30	Cukup Efisien

Sumber: Hasil Diolah Peneliti (2025).

Pada 2020, rasio efisiensi belanja tercatat sebesar 91,19% dan berada pada kategori cukup efisien. Pada 2021, rasio ini menurun menjadi 88,72% sehingga masuk kategori kurang efisien, yang kemungkinan dipengaruhi oleh refocusing anggaran selama pandemi. Pada 2022, nilai rasio sedikit membaik menjadi 88,93% namun masih menunjukkan efisiensi yang rendah. Selanjutnya, pada 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 92,30%, sehingga kembali masuk kategori cukup efisien

4.6 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan dalam penelitian ini sebagai pelengkap analisis rasio keuangan daerah untuk memberikan gambaran strategis terkait posisi kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi. Melalui identifikasi faktor internal dan eksternal, analisis ini bertujuan merumuskan strategi yang relevan bagi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

4.6.1 Hasil Matriks IFAS dan EFAS

Analisis melalui Matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) serta EFAS (*External Factor Analysis Summary*) dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi internal maupun eksternal BPKAD Kota Jambi. Hasil perhitungan dari kedua matriks tersebut menjadi dasar dalam menentukan posisi BPKAD Kota Jambi pada analisis SWOT dan perumusan strategi yang tepat.

Tabel 6. Matriks IFAS

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Strengths (Kekuatan)			
Perencanaan anggaran efisien dan transparan.	0,11	3	0.33
Realisasi PAD sesuai target.	0,11	4	0,44
Sistem informasi keuangan berjalan baik.	0,12	4	0,48
Laporan keuangan sesuai SAP.	0,11	3	0,33
Pelatihan SDM keuangan rutin.	0,12	4	0.48

Weaknesses (Kelemahan)			
Ketergantungan pada dana transfer pusat.	0,11	1	0,11
Anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja.	0,05	2	0,10
Program anggaran kurang tepat sasaran.	0,06	2	0,12
Serapan anggaran rendah di akhir tahun.	0,10	1	0,10
Evaluasi kinerja keuangan belum berkelanjutan.	0,10	2	0,20
Total	1,00	-	2,72

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Matriks IFAS menunjukkan bahwa BPKAD Kota Jambi memiliki kekuatan berupa perencanaan anggaran yang transparan, realisasi PAD yang sesuai target, sistem informasi keuangan yang baik, laporan keuangan sesuai SAP, serta pelatihan SDM yang rutin. Namun, terdapat kelemahan seperti ketergantungan pada transfer pusat, anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, program yang kurang tepat sasaran, serapan anggaran yang rendah di akhir tahun, serta evaluasi kinerja keuangan yang belum berkelanjutan.

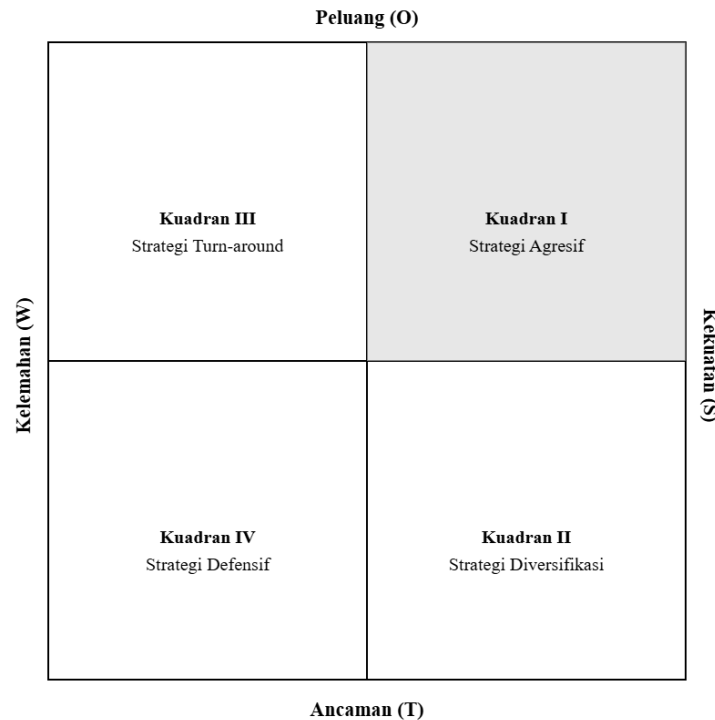
Tabel 7. Matriks EFAS

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Opportunities (Peluang)			
Dukungan kebijakan pusat.	0,12	4	0,48
Perkembangan teknologi informasi.	0,12	3	0,36
Potensi PAD melalui inovasi layanan.	0,12	4	0,48
Kemitraan dengan swasta/BUMD.	0,10	3	0,30
Keterbukaan informasi publik.	0,11	3	0,33
Threats (Ancaman)			
Ketidakpastian ekonomi nasional.	0,11	2	0,22
Perubahan regulasi pusat.	0,07	1	0,07
Inflasi memengaruhi daya beli masyarakat.	0,11	1	0,11
Minim inovasi dalam pengelolaan PAD.	0,07	2	0,14
Persaingan antar daerah dalam menarik investasi.	0,06	2	0,12
Total	1,00	-	2,63

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Matriks EFAS menunjukkan bahwa BPKAD Kota Jambi memiliki sejumlah peluang, seperti dukungan kebijakan pusat, kemajuan teknologi informasi, potensi peningkatan PAD melalui inovasi layanan, kemitraan dengan BUMD, serta keterbukaan informasi publik. Namun, terdapat ancaman berupa ketidakpastian ekonomi nasional, perubahan regulasi, tekanan inflasi, minimnya inovasi PAD, dan

4.6.2 Diagram Analisis SWOT



Gambar 1. Diagram Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi BPKAD Kota Jambi berada pada kuadran I, yaitu kuadran strategi agresif. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan internal yang dimiliki, seperti integrasi sistem informasi keuangan daerah (SIMDA/SIPKD), ketersediaan SDM akuntansi dan keuangan publik yang cukup mumpuni, serta dukungan regulasi pemerintah pusat, relatif lebih dominan dibandingkan kelemahan yang ada. Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya peluang eksternal berupa digitalisasi keuangan daerah, dukungan pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri, potensi peningkatan PAD, serta peluang kerja sama dengan lembaga pengawas eksternal.

5. PEMBAHASAN

5.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kota Jambi pada periode 2020–2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah tercatat sebesar 22,85% dengan kategori cukup. Pada tahun 2021, nilai ini meningkat menjadi 27,38%, masih dalam kategori cukup. Selanjutnya pada tahun 2022, rasio kembali naik menjadi 28,68% dan masih berada pada kategori cukup. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian rasio 30,82%, sehingga masuk kategori sedang.

Peningkatan rasio derajat desentralisasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi secara bertahap mulai mampu meningkatkan peran PAD dalam struktur pendapatan daerah. Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, kontribusi PAD

masih belum dominan. Hal ini terlihat dari proporsi PAD yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Dengan demikian, tingkat kemandirian fiskal Kota Jambi masih perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Oktaviani et al (2022) yang menganalisis kinerja keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menemukan bahwa derajat desentralisasi fiskal di daerah tersebut masih tergolong rendah hingga sedang, menunjukkan ketergantungan yang besar pada transfer pemerintah pusat. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Purwati & Firmansyah (2024) yang meneliti pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, namun rata-rata kontribusi PAD masih terbatas sehingga belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan daerah.

5.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode 2020–2023 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020, rasio kemandirian tercatat sebesar 26,35% dan dikategorikan konsultatif. Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat maupun provinsi masih relatif terbatas. Selanjutnya, pada tahun 2021, rasio kemandirian meningkat menjadi 31,49%, kemudian sedikit menurun menjadi 31,68% pada tahun 2022, dan kembali meningkat pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 34,12%. Meskipun terjadi fluktuasi, tren kemandirian fiskal Kota Jambi menunjukkan arah positif, namun secara keseluruhan masih berada pada kategori konsultatif.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Kota Jambi belum sepenuhnya mandiri dalam aspek keuangan daerah. Ketergantungan terhadap dana perimbangan masih cukup besar, sehingga ruang fiskal pemerintah kota dalam mengatur otonomi keuangan masih terbatas. Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset, serta inovasi layanan publik perlu menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Fahriza & Riswati (2023) mengenai Kabupaten Bandung Barat, yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah masih berada pada tingkat sangat rendah karena kontribusi PAD yang minim sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat tetap dominan. Konsistensi hasil juga terlihat pada penelitian Syam & Zulfikar (2022) yang menganalisis kemandirian fiskal daerah secara nasional dan menemukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki rasio kemandirian rendah, menandakan tingginya ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Kedua temuan tersebut memperkuat gambaran bahwa peningkatan PAD merupakan faktor kunci dalam mendorong kemandirian fiskal yang lebih optimal di daerah.

Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Jambi Periode Tahun 2020-2023 (Windi Anggriani, Rita Friyani, Nela Safela)

5.3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Jambi pada 2020–2023 tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi. Nilainya bergerak fluktuatif dari 72,47% pada 2020, turun menjadi 68,93% pada 2021, kembali naik ke 71,32% pada 2022, dan turun sedikit ke 69,18% pada 2023. Pola ini menunjukkan bahwa dominasi dana transfer masih kuat dan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri masih rendah. Dengan rata-rata di atas 65%, tingkat ketergantungan tersebut tetap berada pada kategori “sangat tinggi”, sehingga kemandirian fiskal Kota Jambi belum optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Saragih & Nurlinda (2023) yang menganalisis kinerja keuangan beberapa kabupaten hasil pemekaran di wilayah Tapanuli Utara, yang menunjukkan bahwa rasio ketergantungan fiskal daerah masih berada pada level sangat tinggi, mengindikasikan dominasi dana transfer dari pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Penelitian lain oleh Dewi et al (2025) terhadap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga menemukan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah tergolong sangat tinggi, meskipun efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran relatif baik, sehingga kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri masih terbatas.

5.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas PAD Pemerintah Kota Jambi pada 2020–2023 menunjukkan pola fluktuatif. Nilai efektivitas mencapai 96,23% pada 2020 (cukup efektif), turun signifikan menjadi 84,74% pada 2021 (kurang efektif), kemudian meningkat kembali menjadi 91,20% pada 2022 (cukup efektif), namun kembali menurun ke 82,88% pada 2023 (kurang efektif). Pola ini menggambarkan bahwa efektivitas PAD belum tercapai secara optimal karena realisasi belum konsisten memenuhi target. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kontribusi beberapa sumber PAD, kendala pemungutan retribusi, serta dampak eksternal seperti pandemi COVID-19 yang memengaruhi kinerja penerimaan pada tahun 2021 dan setelahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Faradilla & Hanifa (2024) yang menganalisis rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Kota Surabaya, yang menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas PAD daerah berada di bawah target sehingga dikategorikan kurang efektif, mencerminkan tantangan konsistensi pencapaian target PAD dari tahun ke tahun. Selaras dengan itu, studi tentang efektivitas dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Timur juga menunjukkan bahwa efektivitas PAD berfluktuasi antar tahun dan tidak selalu konsisten mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga menjadi indikator bahwa kemampuan daerah dalam merealisasikan target PAD membutuhkan perbaikan

5.5 Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja Pemerintah Kota Jambi pada periode 2020–2023 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, nilai rasio sebesar 91,19 persen menempatkan efisiensi belanja dalam kategori cukup efisien, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga realisasi belanja agar tetap terkendali sesuai perencanaan meskipun terdapat sebagian anggaran yang tidak terserap. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 tingkat efisiensi belanja menurun sehingga masuk kategori kurang efisien, suatu kondisi yang tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang mendorong adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, serta kebutuhan darurat lainnya.

Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan fiskal yang signifikan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak dan kapasitas anggaran. Memasuki tahun 2023, rasio efisiensi belanja kembali menunjukkan perbaikan dan dikategorikan cukup efisien, menggambarkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah seiring dengan meredanya krisis pandemi dan kemampuan pemerintah dalam menata kembali prioritas belanja secara lebih proporsional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Febrianti et al (2024) menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode pandemi COVID-19 tergolong kurang efisien, mencerminkan tekanan fiskal akibat refocusing dan realokasi anggaran pada periode krisis. Temuan ini juga konsisten dengan hasil studi Habibi et al (2024) yang menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi APBD di Kota Surakarta, di mana dinamika rasio efisiensi belanja menunjukkan variasi antar tahun yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal pengelolaan keuangan daerah

5.6 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode 2020–2023. Dari sisi internal, kekuatan daerah terlihat pada potensi peningkatan PAD yang cukup baik serta efisiensi belanja yang masih berada pada kategori cukup efisien, meskipun mengalami fluktuasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal melalui pengendalian belanja dan pengoptimalan penerimaan. Namun demikian, kelemahan yang menonjol adalah rendahnya tingkat kemandirian keuangan yang menandakan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer, serta komposisi belanja yang masih didominasi oleh belanja rutin sehingga membatasi ruang pembangunan daerah.

Dari sisi eksternal, Pemerintah Kota Jambi memiliki peluang berupa dukungan kebijakan fiskal nasional, potensi pertumbuhan sektor ekonomi lokal seperti UMKM dan perdagangan, serta pengembangan digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah. Namun, peluang ini diimbangi oleh ancaman seperti ketidakpastian kebijakan fiskal nasional, fluktuasi ekonomi, serta risiko lemahnya pengawasan internal yang dapat menghambat pencapaian kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Malau & Situngkit (2025) yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja daerah dapat berada pada tingkat yang relatif

Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Jambi Periode Tahun 2020-2023 (Windi Anggriani, Rita Friyani, Nela Safela)

tinggi pada beberapa periode, namun tetap menunjukkan variasi antar tahun sehingga mencerminkan tantangan dalam pengendalian belanja publik secara konsisten. Temuan ini juga konsisten dengan studi Safitri et al (2025) yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja tergolong kurang efisien pada beberapa tahun anggaran, menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal termasuk alokasi anggaran dan pola belanja daerah.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Periode 2020–2023, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Rasio Derajat Desentralisasi masih rendah, menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah kecil sehingga kemandirian fiskal Pemerintah Kota Jambi masih terbatas dan bergantung pada transfer pusat.
- 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga rendah, menandakan ketergantungan yang besar pada pendanaan pusat untuk membiayai berbagai program pembangunan.
- 3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada pada kategori tinggi, mempertegas rendahnya kapasitas fiskal daerah dan besarnya peran dana transfer dalam struktur pendapatan.
- 4) Rasio Efektivitas PAD tergolong baik karena target PAD dapat direalisasikan, menjadi modal penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal ke depan.
- 5) Rasio Efisiensi Belanja berfluktuasi, cukup efisien pada 2020 dan 2023 serta kurang efisien pada 2021 dan 2022, sehingga pengendalian anggaran perlu diperkuat untuk menjaga efisiensi belanja.
- 6) Strategi peningkatan kinerja keuangan meliputi pemanfaatan sistem informasi keuangan, digitalisasi PAD, peningkatan kapasitas SDM, kerja sama dengan swasta/BUMD, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas agar lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan dinamika ekonomi.

6.2 Saran

- 1) Bagi Pemerintah Kota Jambi

Disarankan agar pemerintah kota jambi meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi pad, terutama dari pajak dan retribusi daerah, serta memperbaiki efisiensi dan produktivitas belanja.

- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian kinerja keuangan daerah sebaiknya mencakup periode yang lebih panjang dan menggunakan metode analisis yang lebih beragam agar hasilnya lebih komprehensif serta memungkinkan perbandingan antar daerah secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. A., Haryono, Rusliyawati, & Astarani, J. (2025). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(6), 753–763.
- Fahriza, M., & Riswati. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. *JEKP: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 10(2), 158–172.
- Faradilla, S. P., & Hanifa, N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi PAD dan Kemandirian Kota Surabaya. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 4(3), 98–104.
- Febrianti, R., Kusumadewi, R., & Setiowati, N. E. (2024). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pagu Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota / Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Periode 2020 – 2021. *JUSTIKA: Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 04(01).
- Fitri, F., & Kamela, H. (2025). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019-2023. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 69–75.
- Habibi, Utami, W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kota Surakarta). *JIKAB: Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 483–488.
- Halim, A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Kartika, Y. (2023). KINERJA KEUANGAN DAERAH: Tinjauan Rasio Kemandirian , Efektifitas , Efisiensi , dan Share and Growth. *FAIR: Financial & Accounting*, 3(2), 110–119.
- Mahmudi. (2020). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Salemba Empat.
- Malau, D., & Situngkit, A. (2025). Analisis Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 2(4), 93–107.
- Mulyaningsih, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: BPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2020). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819>
- Oktaviani, E., Risma, D., & Pattisahusiwa, S. (2022). Analisis rasio keuangan daerah pada kabupaten kutai kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(1), 77–85.
- Purwati, Y. E., & Firmansyah, A. (2024). Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuangan dalam Hubungan Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(April), 4877–4888.

Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Jambi Periode Tahun 2020-2023 (Windi Anggriani, Rita Friyani, Nela Safela)

Rahmanda, G. A., Prihandoko, N. D., Amalia, T. A., & Rahmani, N. (2025). Measuring The Financial Performance Of Local Governments: A Ratio-Based Analysis. *Jurnal Multiparadigm Acoounting Research*, 3(1), 62–79.

Safitri, T., Safelia, N., & Rahayu. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Analisis SWOT Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Periode 2020-2023. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4661–4672.

Saragih, R., & Nurlinda. (2023). Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6, 1–11.

Sedarmayanti. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. PT Refika Aditama. Bandung.

Sianturi, R. D. (2020). Manajemen Pemasaran Menggunakan Analisis SWOT Pada UMKM Guna Meningkatkan Daya Saing UMKM. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 1(1), 45–50. <https://doi.org/10.47065/jbe.v1i1.118>

Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/48423>

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114.

Yuvanda, S., Yuniarti, T., & Nurkodri, M. S. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Hubungan Dengan Kemiskinan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnak Manajemen Terapan Dan Keuangan (Menkeu)*, 14(03), 1228–1236.